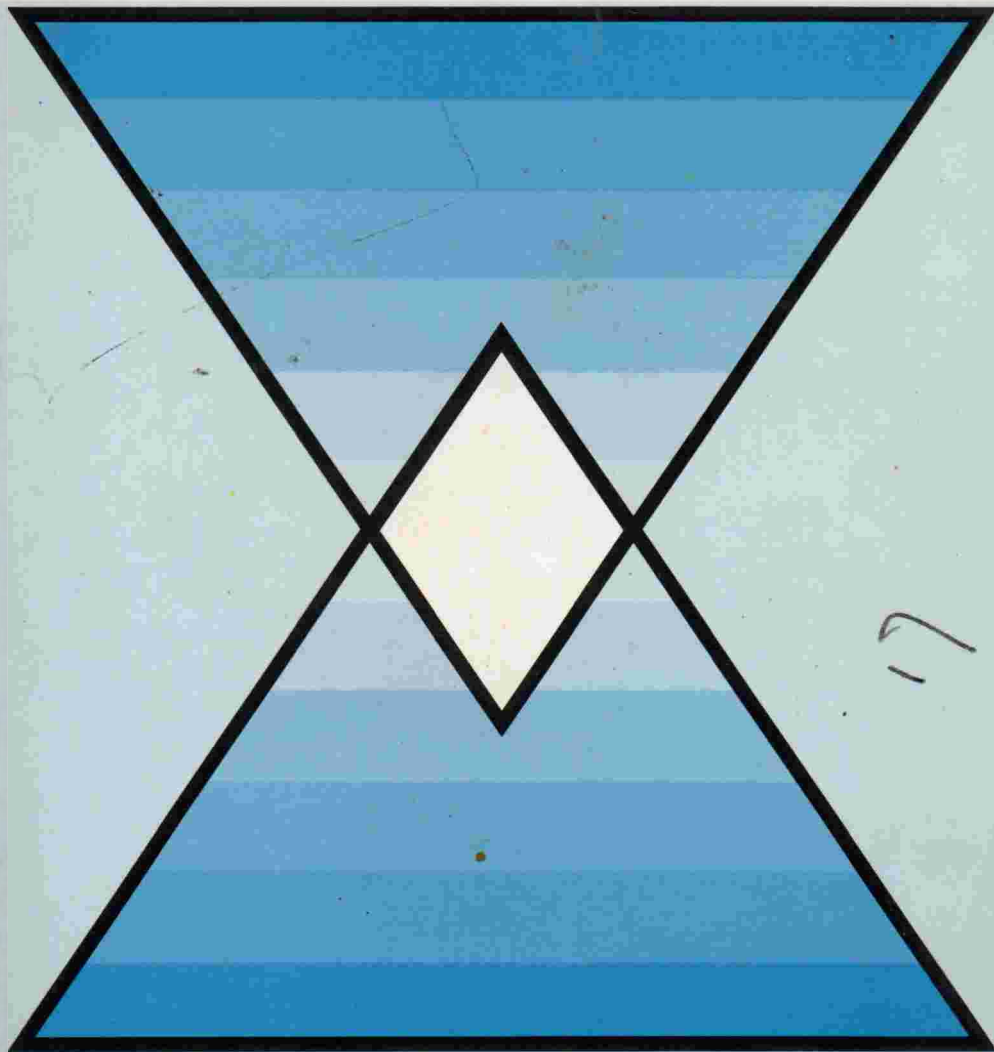


JURNAL ILMU SOSIAL ALTERNATIF

Volume IX, No. 1, Mei 2008

ISSN: 1411-3821



Diterbitkan oleh:
Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD"

JURNAL ILMU SOSIAL ALTERNATIF

Terbit dua kali setahun pada bulan Mei dan Desember. Berisi artikel ilmiah hasil pemikiran dan penelitian di bidang Pembangunan Masyarakat Desa, Ilmu Sosiatri, Ilmu Pemerintahan, dan Ilmu Komunikasi.

Dewan Redaksi

Ketua:
Sutoro Eko Yunanto

Anggota:
Fajarini Sulistyowati
E.W. Tri Nugroho
Leslie Retno Angeningsih

Mitra Bestari

Eka Suaib (Universitas Halu Oleo, Kendari, Sulawesi Tenggara)
Fred L. Benu (Universitas Nusa Cendana, Kupang, NTT)
FX. Mukarto (Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, DIY)
Turnomo Raharjo (Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah)
Suwondo (Universitas Lampung, Bandar Lampung, Lampung)
Wirawan (Universitas Airlangga, Surabaya, Jawa Timur)
Wuradji (Universitas Negeri Yogyakarta, DIY)

Pelaksana Tata Usaha
Joko Legowo S.Sos.

Alamat Penyunting dan Tata Usaha: Redaksi Jurnal Ilmu Sosial Alternatif, STPMD "APMD", Jl. Timoho No. 317, Telpn 561971, Fax: 515989 - Yogyakarta 55225.
Email: jjisa@yahoo.co.id.

Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD", sejak Mei 2000 menerbitkan terbitan berkala ilmiah "Ganesha": Wacana Pembangunan Masyarakat. Untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman dan Instrumen Evaluasi untuk Akreditasi Berkala Ilmiah yang dikeluarkan oleh Ditbinlitabmas, Ditjen Dikti, Depdikbud Tahun 2001, STPMD "APMD" sejak Mei 2003, mengubah "Ganesha" tersebut menjadi **JURNAL ILMU SOSIAL ALTERNATIF (JISA)**.

Petunjuk Penulisan Artikel untuk Jurnal Ilmu Sosial Alternatif (JISA) ada di sampul belakang bagian dalam.

Penjelasan Cover Depan (Gambar): Gambar itu menjelaskan 'apa yang dimaksud dengan ilmu sosial alternatif? Segitiga atas menggambarkan teori/narasi besar. Segi tiga bawah menggambarkan praksis/pengalaman konkret/narasi kecil. Jadi, yang dimaksud dengan ilmu sosial alternatif adalah ilmu tentang masyarakat yang merupakan hasil perjumpaan antara teori/narasi besar dengan praksis/pengalaman konkret/narasi kecil (warna putih). Ini berarti bagaimana teori/narasi besar memberi pencerahan pada pengalaman/permasalahan konkret dan bagaimana pengalaman konkret atau narasi kecil memperkuat dan memperkuat teori/narasi besar.

Dicetak di Percetakan "Aditya Media". Isi di luar tanggungjawab percetakan

Penanggulangan Kemiskinan di Perdesaan dalam Perspektif Pembangunan Sosial <i>Suparjan</i>	1-18
Kemiskinan di Perdesaan dalam Dimensi Ekonomi dan Politik <i>Parwoto</i>	19-32
Mengatasi Kesenjangan Desa-Kota dalam Rangka Mencegah Urbanisasi <i>Oktarina Albizzia</i>	33-46
Kemiskinan, Penyebab dan Kekerasan yang Menyertainya <i>Ade Chandra</i>	47-59
Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan Rumah Tangga Petani <i>Utami Sulistiana</i>	60-76
Kontribusi Lembaga Sosial dalam Mempersempit Kemiskinan di Perdesaan <i>Sugiyarto</i>	77-95
Peran Balai Latihan Kerja (BLK) dalam Penanggulangan Kemiskinan (Suatu Kajian Nilai Sosial) <i>Leslie Retno Angeningsih</i>	96-114

KONTRIBUSI LEMBAGA SOSIAL DALAM MEMPERSEMPIT KEMISKINAN DI PERDESAAN

Sugiyanto¹

ABSTRACT

Poverty exists because people's individual and collective needs are not met. Theoretically there are three types of poverty: absolute, relative, cultural and structural. Effort to eradicate poverty has been done by both government and non-government organizations. Social institutions are part of non-government organization which are established and run by the civil society. Social institution both in the urban and the rural areas, have many different activities. The activities of the social institutions in the rural areas include "arisan" of money, of goods, of manpower, savings and borrowing of money or goods, collective savings and "jimpitan". All these activities help community members to meet their immediate needs and help maintain their believed norms of the social institutions.

Social institutions have both social resources and capital which have the potential to become social energy. If the social energy can be transformed into material or financial resources, it is very valuable. In turn, therefore, social institutions play a very important role in eradicating poverty in the rural areas.

Kata-kata kunci : Lembaga Sosial, Kemiskinan, Perdesaan.

PENDAHULUAN

Masalah kemiskinan di dunia khususnya di kawasan perdesaan terjadi sejak dulu bukan hanya hadir pada saat ini. Hal ini dapat dibuktikan bahwa sejak lama topik kemiskinan menjadi perhatian banyak pihak dari tingkat lokal sampai dunia internasional baik di dalam agenda seminar, lokakarya, penelitian dan simposium, bahkan dalam Konferensi Bumi di Rio de Janeiro Brazil diumumkan bahwa

penduduk dunia pada akhir abad 20 diperkirakan mencapai 5,25 milyar jiwa. Dillon dan Hermanto (1993:11) berpendapat bahwa pertambahan penduduk dunia akan didukung oleh negara-negara dunia ketiga, kelompok negara-negara ini akan menyumbang posisi yang paling besar. Negara-negara tersebut antara lain Republik Rakyat Cina, Indonesia, Brazil, India, Bangladesh, Mexico, Pakistan dan Negeria.

¹ Penulis adalah dosen Program Studi Ilmu Sosiatri STPMD " APMD " Yogyakarta

Perkiraan 5,25 milyar jiwa yang miskin akan berpeluang kuat menjadi bodoh, terbelakang, rentan terhadap kesehatan dan rentan berperilaku menyimpang. Risiko kerentanan akan berimbas pada pudarnya budaya lokal dan muncul gejala yang anarkis. Kemiskinan merupakan masalah sosial yang paling besar, sehingga upaya penanganan kemiskinan harus dilakukan secara holistik termasuk injeksi dari pihak lain. Sebagai contoh keterlibatan Bank Dunia terhadap beberapa negara berkembang memberikan berbagai bantuan/donor sebagai tambahan energi dan stimulan. Kondisi ini menunjukkan bahwa satu negara tidak mampu mengatasi masalah kemiskinan secara residual, tetapi penanganan masalah kemiskinan harus secara holistik, sehingga memerlukan injektor.

Sebab-sebab kemiskinan yang dominan yang terjadi pada negara berkembang antara lain: 1) penyebaran kekayaan serta fasilitas publik yang tidak merata, 2) mitos bahwa miskin merupakan takdir, 3) diskriminasi gender yang memposisikan pada pihak yang tidak menguntungkan, 4) musibah dan bencana alam dan 5) rusaknya lingkungan karena ulah sekelompok manusia yang memiliki kekuasaan.

Di Indonesia untuk mengatasi kemiskinan pemerintah tidak bisa menentukan sendiri, sampai tahun 2008 kebijakan pengentasan masalah kemiskinan selalu melibatkan sisi eksternal negara yang berfungsi sebagai lembaga donor. Dalam upaya

pengentasan kemiskinan secara internal pemerintah harus mampu menggali potensi internal seperti dunia industri, perguruan tinggi, dan peran serta lembaga-lembaga sosial di tingkat lokal.

Kemiskinan lebih banyak terjadi pada masyarakat yang berdomisili di perkotaan dibanding di perdesaan. Menurut Supardal (2007: 80) identifikasi kemiskinan penduduk desa disebabkan oleh ketimpangan aset, dominasi negara, eksploitasi pasar, ketimpangan sumberdaya manusia dan kebijakan yang tidak memihak rakyat.

Menurut ilmu Sosiologi identifikasi kemiskinan dikelompokkan menjadi 4 (empat) yaitu: kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural. Ciri-ciri dimensi kemiskinan di atas disimplikasikan sebagai berikut:

1. Kemiskinan absolut, keadaan miskin yang disebabkan oleh ketidakmampuan seseorang atau kelompok orang dalam memenuhi kebutuhan pokoknya seperti pangan, sandang, dan papan. Kemiskinan absolut diukur berdasarkan batas kemiskinan dengan indikator tunggal atau komposit yang dikonversikan dalam bentuk uang (pendapatan dan pengeluaran). Dengan demikian orang atau sekelompok orang dikategorikan miskin jika kemampuan ekonominya di bawah garis kemiskinan.
2. Kemiskinan relatif, keadaan miskin yang dialami individu atau

kelompok dibandingkan dengan kondisi umum suatu masyarakat. Contoh, pak Kardi memiliki pendapatan perbulan Rp. 1.000.000,00 tetapi pendapatan rata-rata masyarakat di wilayah pak Kardi bertempat tinggal adalah Rp 1.250.000,00, maka pak Kardi termasuk kategori miskin. Sehingga, walaupun pak Kardi dengan penghasilan tersebut mampu memenuhi kebutuhan anggota keluarganya namun ia termasuk kategori miskin.

3. Kemiskinan kultural, bentuk kemiskinan kultural ditandai dengan sikap, gaya hidup nilai dan orientasi sosial budaya seseorang atau kelompok orang yang tidak sejalan dengan etos kemajuan (modernitas). Indikator kemiskinan kultural antara lain sikap malas, tidak memiliki kebutuhan berprestasi, berorientasi ke masa lalu dan tidak memiliki jiwa berwirausaha, sulit diajak berpartisipasi, malas dan boros.
4. Kemiskinan struktural muncul karena akibat perbuatan manusia, seperti ketidakadilan struktur, baik struktur sosial, struktur politik, distribusi aset ekonomi yang tidak adil, dan struktur ekonomi, kolusi, korupsi dan tatanan ekonomi dunia cenderung menguntungkan kelompok masyarakat tertentu. Proses terjadinya kemiskinan struktural di Indonesia karena terdapat kesenjangan dalam pembagian aset produktif dalam masyarakat.

Kesenjangan ini dimulai sejak jaman feodal, diperkuat jaman kolonial dan puncaknya jaman modern rezim Orde Baru, dan masih berlaku sampai saat ini.

Dimensi kemiskinan menurut pandangan ilmu Pertanian masih ditambah satu yaitu dimensi kemiskinan natural, menurut Irham (2008: 1), adalah keadaan miskin bagi seseorang karena minimnya sumberdaya yang dimiliki atau karena imbalance pendapatan yang rendah. Kondisi ini sering disebut dengan istilah kemiskinan kronis atau turun temurun.

Kelima dimensi kemiskinan di atas semuanya merupakan proses yang tereduksi akibat kerentanan pada banyak faktor. Kondisi ini menunjukkan substansi kemiskinan terletak pada kesenjangan. Menurut Ambar (2004: 22), kesenjangan yang dimaksud muncul karena tidak meratanya akses yang dapat diperoleh semua segmen sosial masyarakat dengan porsi yang relatif sama. Akses seringkali hanya dapat dijangkau oleh lapisan tertentu saja sedang yang lain sangat susah untuk memperolehnya.

Realita yang terjadi saat ini, sumberdaya energi dunia mulai menipis, maka para pemegang kekuasaan dunia meluncurkan kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak dunia. Kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak akan berimbas terhadap penduduk Indonesia. Menurut Irham (2008: 23), jika harga bahan bakar minyak dinaikkan maka kemiskinan di

Indonesia akan naik 15,68 juta atau 8,55%. Menurut BPS tahun 2007 dalam hitungan kasar setiap 40 juta penduduk miskin terdapat 10 juta keluarga miskin, artinya jika saat ini jumlah penduduk Indonesia 124.000.000 maka di Indonesia terdapat 31.000.000 keluarga miskin.

Upaya-upaya penanggulangan kemiskinan oleh pemerintah telah diluncurkan berbagai model seperti Program Padat Karya (PPK), Inpres Desa Tertinggal (IDT), Asuransi Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (Askeskin), Jaringan Pengaman Sosial (JPS), Bantuan Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin), Program Takesra dan Kukesra, Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Program Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP), Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Pemberian Makanan Tambahan untuk Anak Sekolah (PMT-AS), Program Dana Beasiswa dan Bantuan Operasional (DBO), Bantuan Tunai Langsung (BLT), serta Bantuan Langsung untuk Mahasiswa (BLM). Selain itu, ada pula upaya tersebut dilakukan oleh *Non Governace Organization* (NGO) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) seperti Yayasan Indonesia Sejahtera, Yayasan Kristen Untuk Kesehatan Umum (Yakkum), dan Yayasan Bakti Amal, dan Yayasan Dana Bakti Astra.

Walaupun upaya penanggulangan kemiskinan telah dilakukan oleh pemerintah dengan berbagai model dan didukung pihak organisasi non pemerintah (NGO) atau LSM, dan yayasan, tetapi kemiskinan di Indonesia bukan semakin berkurang justru semakin luas.

Tulisan berjudul "kontribusi lembaga sosial dalam mempersempit kemiskinan di perdesaan" penting dihadirkan di tengah publik sebab tulisan ini tidak membahas teori kemiskinan dan seluk beluknya tetapi lebih menunjukkan aktivitas dan fungsi beberapa lembaga sosial khususnya yang berada di perdesaan yang telah memberikan kontribusi dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat level bawah sehingga lembaga sosial memiliki peran dalam meminimalkan kemiskinan.

Kondisi Kemiskinan di Indonesia

Di Indonesia kemiskinan terjadi sejak jaman feodal jauh sebelum nama Indonesia diproklamasikan, kemiskinan di Indonesia sejak jaman feodal hingga saat ini didominasi oleh masyarakat yang bertempat tinggal di perdesaan, sebagai contoh data penduduk miskin tahun 1996-2007 disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1
Presentasi Penduduk Miskin di Indonesia 1996-2007

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (juta)			Presentase Penduduk Miskin		
	Kota	Desa	Kota-Desa	Kota	Desa	Kota Desa
1996	9,42	24,59	34,01	13,39	19,78	17,47
1998	17,60	31,90	49,50	21,92	25,72	24,23
1999	15,64	32,33	47,97	19,41	26,03	23,43
2000	12,30	26,40	38,70	14,60	22,38	19,14
2001	8,60	29,30	37,90	9,76	24,84	18,41
2002	13,30	25,10	38,40	14,46	21,10	18,20
2003	12,20	25,10	37,30	13,57	20,23	17,42
2004	11,40	24,80	36,10	12,13	20,11	16,66
2005	12,40	22,70	35,10	11,68	19,98	15,97
2006	14,49	24,81	39,30	13,47	21,81	17,75
2007	13,56	23,81	37,17	12,52	20,37	18,20

Sumber : Didah dari data Survey Sosial Ekonomi Nasional, Badan Pusat Statistik 2007

Tabel 1 di atas menunjukkan ada perbedaan jumlah penduduk miskin antara desa dan kota. Secara holistik dari aspek kuantitas penduduk miskin di Indonesia cenderung bertambah atau naik, walaupun pada tahun 2003 sampai 2005 ada penurunan. Awai melonjaknya angka kemiskinan di Indonesia disebabkan kondisi krisis ekonomi yang berkepanjangan yang puncaknya terjadi pada tahun 1998. Informasi terakhir disajikan oleh harian Kedaulatan Rakyat edisi Mei 2008 bahwa tahun 2008 sampai bulan April telah terdata jumlah penduduk miskin 36,80 juta dan prosentase mencapai 16,85. Di sisi lain data Tabel 1 menunjukkan mayoritas penduduk miskin di Indonesia bermukim di kawasan perdesaan.

Dampak langsung kemiskinan bagi sebagian besar masyarakat melahirkan fenomena kriminalitas, kekerasan dalam masyarakat dan rumah tangga, perkelahian antar kampung/

desa dan aktivitas berbagai pelecehan. Secara riil dampak kemiskinan di Indonesia menurut Utaryo (2005: 159) antara lain: 1) kekurangan kebutuhan hidup yang primer seperti pangan, sandang dan papan, 2) rendahnya kondisi kesehatan dan rendahnya harapan hidup terutama untuk bayi lahir dan usia lanjut, 3) tingginya penggunaan obat-obat terlarang untuk bunuh diri dan pelarian stress yang berdampak sakit jiwa, 4) meningkatnya angka kriminalitas dan kekerasan, 5) melonjaknya permasalahan keluarga rentan seperti mentelantaran anak, kekerasan, perceraian, dan kelahiran diluar nikah, 6) keributan yang bersumber masalah kesenjangan, 7) tersingkirnya sekelompok masyarakat dari kehidupan dan pergaulan tertentu seperti pengusuran tukang becak, 8) serta semakin sempitnya lahan pertanian di kawasan perdesaan.

Kondisi miskin membuat masyarakat sulit mengakses politik, sehingga suara mereka nyaris tidak terdengar, walaupun mereka pada posisi mayoritas. Apalagi mengakses kehidupan yang memerlukan biaya tinggi, sehingga kehidupan masyarakat miskin bagai lingkaran setan yang tidak ada ujung pangkalnya dan yang sulit diputus. Sebab banyak faktor yang berpengaruh.

Kemiskinan di Indonesia jika kita bandingkan dengan negara-negara berkembang lain seperti Republik Rakyat Cina, Brazil, India, Bangladesh, Mexico, Pakistan dan Negeria akan ditemukan persamaan dan perbedaan yang menarik, misalnya faktor penyebab terjadinya kemiskinan, penentuan standar kemiskinan, dan program-program penanggulangan yang telah dilakukan.

Karakteristik Lembaga Sosial

Pada umumnya lembaga sosial lahir di tengah-tengah masyarakat sipil, menurut Suharko (2005: 277) masyarakat sipil atau diartikan sebagai agen atau aktor dan dapat diartikan sebagai arena. Masyarakat sipil sebagai agen atau aktor dimaknai sebagai kemampuan kelompok-kelompok asosiasional umumnya dan kebiasaan-kebiasaan asosiasi khususnya untuk melindungi pola-pola peradaban yang melekat dalam tindakan-tindakan warga di dalam masyarakat yang demokratis. Dan masyarakat sipil sebagai arena dimaknai sebagai

suatu lingkup tindakan yang independen dari negara dan yang mampu menggerakkan resistensi terhadap rezim tiranis. Lembaga sosial merupakan bagian dari Organisasi Masyarakat Sipil (OMS). Organisasi Masyarakat Sipil menurut Hyden (1998: 212) adalah semua organisasi dan asosiasi yang berada di luar sektor negara. Mencakup dari yang kecil, lokal bersifat ketetanggaaan sampai organisasi berbasis keanggotaan berorientasi nasional. Diamond (1999: 32) berpendapat OMS adalah organisasi atau asosiasi yang ada di luar negara bersifat bebas dan independen, karakternya bersifat sekunder baik formal maupun informal yang dapat dikategorikan bersifat ekonomis, kultural, informasional, *interest* dan *issue* oriented. Dengan demikian OMS pada dasarnya memiliki kepedulian yang berhubungan dengan tujuan publik, berhubungan dengan negara dengan berbagai cara, memperjuangkan pluralisme, tidak mewakili individu tetapi mewakili kelompok, berada dalam fenomena demokrasi. Ditinjau dari sisi keanggotaan OMS ada yang berbasis keanggotaan dan yang tidak berbasis keanggotaan.

OMS yang tidak berbasis keanggotaan misalnya LSM dan Ornop, Organisasi pelayanan kesejahteraan sosial, organisasi amal, organisasi semi pemerintah dan organisasi semi bisnis. OMS berbasis keanggotaan misalnya: Kamar Dagang dan Industri (KADIN), Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Serikat Pekerja

Seluruh Indonesia (SPSI), dan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI).

Merujuk pendapat Hyden dan Diamond di atas, maka lembaga sosial dapat dimaknai sebagai akumulasi dari berbagai unsur individu, keluarga dan kelompok sosial. Ciri lembaga sosial menurut Gillin and Gillin (dalam Suryono Soekamto, 1983: 22) memiliki tradisi tertulis atau tidak tertulis yang merupakan tujuan, memiliki pola-pola pemikiran dan perlakuan yang terwujud melalui aktivitas kemasyarakatan, mempunyai alat-alat tertentu yang masing-masing alat tersebut tingkat kekekalanannya relatif dan memiliki lambang-lambang atau simbol-simbol. Untuk mempelajari dinamika lembaga sosial maka dapat ditelusuri melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu: pendekatan historis, pendekatan komperatif dan pendekatan hubungan. Dengan demikian dinamika lembaga sosial akan ditentukan oleh variabel kepemimpinan, sumberdaya, struktur internal dan program-program yang telah disepakati oleh anggota. Di sisi lain lembaga sosial memiliki fungsi laten dan fungsi manifes, kedua fungsi tersebut menjadi cermin para anggota untuk mengontrol pola-pola perilaku setiap anggota. Sesuai dengan siklus kelahirannya bahwa ruh dari lembaga sosial adalah serangkaian norma-norma yang menjadi pedoman berperilaku bagi setiap anggota.

Dalam dinamikanya lembaga sosial memperluas sifat dan fungsi menjadi pendorong artinya lembaga

non profit yang tidak berafiliasi pada kelompok tertentu misalnya negara, agama dan partai politik. Lembaga ini memiliki kepedulian mengembangkan wacana dan solusi. Kondisi ini secara tidak langsung memposisikan lembaga sosial menjadi terminal kebijakan di level mikro, lembaga sosial menjadi media transformasi informasi, lembaga sosial menjadi forum demokrasi dan akhirnya lembaga sosial menjadi jembatan warga. Senafas dengan sifat dan fungsi lembaga sosial ternyata memiliki aneka kekayaan, salah satu bentuk kekayaan lembaga sosial adalah sumberdaya sosial.

Sumberdaya sosial akan menurun tatkala tidak dimanfaatkan oleh anggota, dan sumberdaya sosial akan semakin kuat tatkala anggota rutin memanfaatkannya. Kesediaan anggota memanfaatkan sumberdaya sosial dilandasi oleh 3 (tiga) kekuatan etika, yaitu: etika demokrasi, etika keadilan sosial dan etika kebersamaan. Di dalam lembaga sosial secara langsung ataupun tidak terdapat aktor atau agen yang berfungsi menjadi penggerak (pemimpin dan perencana). Aktor dalam lembaga sosial biasanya adalah relawan yang memiliki kapasitas dan motivasi tinggi terhadap kepedulian dilingkungan setempat. Aktor ini akan bermain pada arena internal dan eksternal. Menurut Sugiyanto (2002: 40), alasan mendasar yang mendorong aktor menjadi relawan, adalah: 1) mereka mau dan sadar, 2) merasa senang dan puas dengan aktivitas tersebut, 3)

mereka memerlukan dalam hidupnya untuk membagi tugas, peran dan tanggungjawab, 4) mereka memperoleh keuntungan secara non ekonomi. Tujuan aktivitas aktor tidak lain adalah upaya pemenuhan kebutuhan para anggota, dengan terpenuhinya kebutuhan setiap anggota berarti aktor bersama anggota mampu memberikan sumbangan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

Bentuk-Bentuk Aktivitas Lembaga Sosial

Setiap lembaga sosial pada umumnya memiliki agenda rutin dan agenda non rutin. Bentuk agenda rutin, misalnya pertemuan rutin, seperti mingguan, bulanan, *selapan* (tigapuluh lima hari sekali), pergantian dan pemilihan pengurus. Aktivitas dalam agenda non rutin misalnya kerja bakti/gotongroyong, aktivitas lain yang bersifat insidental. Sesuai tradisi bahwa munculnya lembaga sosial selalu melekat dengan kebutuhan individu yang tidak mampu dipenuhi secara individu, sehingga pemenuhan kebutuhan tersebut harus dilakukan secara kolektif. Pemenuhan kebutuhan secara kolektif dalam waktu yang panjang berangsur-angsur menjadi aktivitas rutin yang dibingkai dalam wadah organisasi atau lembaga sosial. Menurut Heru Nugroho (2001: 20) lembaga sosial memiliki posisi dalam wilayah kehidupan individu yang bersifat privat dengan lembaga sosial makro yang berhubungan

dengan kehidupan publik. Sesuai maknanya (privat dan publik) maka lembaga sosial mampu menjadi media mediasi.

Bingkai aktivitas lembaga sosial pada umumnya dalam koridor: 1) kewilayahan, seperti rukun tetangga, rukun warga, dusun atau padukuhan dan desa atau kelurahan. Pada masyarakat tradisional ada aktivitas lembaga yang dibatasi wilayah bukan berdasarkan administratif tetapi obyek tertentu sebagai pembatas misalnya jalan, sungai atau sawah, contoh kelompok *Kidulan* artinya ada aktivitas komunitas yang anggotanya adalah warga *kidulan* (selatan) jalan/sungai/sawah atau obyek lain, 2) garis keturunan, ada lembaga sosial yang anggotanya adalah individu-individu dalam satu garis keturunan, baik keturunan *matrilinial* yaitu garis keturunan ibu dan *patrilinial* yaitu garis keturunan ayah, lembaga ini disebut trah, contohnya trah Puropakualaman dan trah Ranggowarsito di Yogyakarta. Lembaga sosial trah bertujuan mempererat ikatan persaudaraan yang berfungsi saling tolong menolong seperti yang terjadi di beberapa desa di kabupaten Muna Sulawesi Tenggara dalam tradisi *Warebu*. Tradisi ini setiap kepala keluarga yang memiliki beban hidup tertentu menjadi tanggungan bersama oleh kepala keluarga yang lain dalam ikatan trah, misalnya menanggung beban sekolah, pernikahan dan lain sebagainya, 3) religiositas, seperti Nahdathul Ulama, Muhammadiyah, Aisyiah, Ahmadiyah, JOY, Mudika, 4)

kesukuan, misalnya persatuan warga Gunungkidul di Jakarta, persatuan keturunan Indonesia di Suriname, keturunan Tionghoa di Indonesia, persaudaraan keluarga Melayu di Yogyakarta, 5) profesi, level mikro sampai makro tukang becak, pedagang eceran di pasar tradisional, pedagang emas, 6) persahabatan, lembaga yang lahir atas dasar persahabatan pada umumnya pada saat proses hidup bersama telah terbangun *core value* yang ditaati dan dihargai oleh setiap anggota. *Core value* itulah yang menciptakan situasi kompak, kebersamaan dan kepercayaan, misalnya sesama alumni atau teman satu sekolah, teman satu perjuangan, eks haji tahun tertentu dan wilayah tertentu, eks peserta kontingen olah raga atau seni. Masih ada lagi lembaga sosial yang terbentuk karena aktivitas ahli waris, contoh Paguyuban Tresno Sejati merupakan paguyuban yang berkembang menjadi lembaga sosial, yaitu para ahli waris yang saudaranya dimakamkan pada satu kuburan yang sama yaitu kuburan Mrican di desa Caturtunggal Depok Sleman DIY, paguyuban ini ada pertemuan rutin dan mengelola kuburan sebaik mungkin demi kenyamanan para ahli waris ketika berkunjung.

Lembaga sosial yang terbentuk berdasarkan kewilayahan/geografis, garis keturunan, religiositas, kesukuan, profesi dan persahabatan semuanya memiliki kesamaan dalam aktivitas dan memiliki ciri khas sebagai identitas. Bentuk aktivitas awal

bermula dari amal dan *charity*, perkembangan selanjutnya mengarah pada pengadaan fasilitas untuk pengembangan kapasitas dan pemenuhan kebutuhan anggota, arisan, simpan pinjam dan usaha-usaha lain yang telah disepakati. Aktivitas sebagai identitas seperti pengkajian budaya dan pengkajian kitab. Bentuk dan ragam aktivitas lembaga sosial pada tataran mikro pada awalnya terbatas untuk pemenuhan kebutuhan anggotanya dan berkembang diluar anggota bagi yang bersedia. Di negara-negara maju/kaya atas dasar kelompok ini menghimpun dana dan diberikan/disumbangkan bagi yang membutuhkan. Di Indonesia baik di desa dan kota sebenarnya sudah ada kelompok-kelompok tertentu melakukan hal yang sama (penggalangan dana) dan dibantukan kepada pihak lain yang membutuhkan seperti rumah zakat, santuan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu melalui gereja dan masjid serta media pemerintah dengan model Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GNOTA). Bentuk kongkrit aktivitas lembaga sosial di perdesaan antara lain :

1. Usaha simpan pinjam,

Dalam aktivitas simpan pinjam setiap anggota mempunyai kewajiban menyimpan, hasil akumulasi simpanan dijadikan modal untuk dipinjamkan kepada setiap anggota yang membutuhkan, jadi setiap anggota mempunyai hak meminjam, Volume pinjaman tergantung besarnya

modal yang terkumpul. Norma meminjam merupakan kesepakatan anggota yang harus ditaati oleh setiap anggota. Ada hal yang menjadi obyek simpan pinjam yaitu uang dan barang.

a) Usaha simpan pinjam uang.
Usaha simpan pinjam uang di Indonesia bukan hal baru tetapi simpan pinjam uang sudah membudaya dan ada di setiap elemen-elemen kehidupan komunitas Indonesia dimulai dari yang informal sampai yang formal, dan dari yang bermodal puluhan rupiah sampai jutaan rupiah, dalam dinamikanya simpan pinjam uang yang dikelola secara tradisional ada yang telah bergeser menjadi koperasi simpan pinjam.

b). Usaha simpan pinjam barang.
Usaha simpan pinjam barang di Indonesia khususnya yang diselenggarakan oleh lembaga sosial di Indonesia terjadi pada komunitas tertentu mulai dari mikro sampai makro. Lembaga sosial di perdesaan yang menyelenggarakan aktivitas ini biasanya dibingkai oleh geografis atau kewilayahan, persamaan profesi usaha, dan pertemanan sebaya. Wujud barang yang dijadikan obyek simpan pinjam di berbagai lembaga sosial di perdesaan antara lain padi, beras, pupuk, kayu dan barang lain yang berupa hasil

sumberdaya alam lokal serta dianggap menjadi kebutuhan dasar bagi anggota.

Aturan main simpan pinjam uang dan barang setiap lembaga sosial memiliki norma yang berbeda, tetapi norma merupakan hasil rembug warga yang telah disepakati bersama. Jadi setiap lembaga memiliki kekhasan dalam simpan pinjam tersebut, sebagai kata kunci norma simpan pinjam tidak memberatkan anggota. Contoh simpan pinjam barang adalah lumbung padi, lumbung kayu dan lumbung pupuk.

2. Jimpitan

Jimpitan merupakan model iuran yang berfungsi mengikat para anggota lembaga sosial sebagai bentuk partisipasi dan solidaritas sosial. Jimpitan di Jawa diterapkan dalam banyak model antara lain:

a. Kegiatan sistem keamanan lingkungan yang dikenal dengan istilah ronda. Pada awalnya setiap rumah dalam wilayah tertentu, setiap malam wajib memasang beras sebanyak sejimpit (kurang lebih satu sendok makan). Beras dikumpulkan pada tempat yang telah ditetapkan bersama. Selanjutnya setiap periode waktu tertentu beras tersebut dilelang atau dijual, uang hasil penjualan beras jimpitan dipergunakan untuk kepen-

tingan anggota masyarakat. Pada akhir-akhir ini jimpitan beras mengalami pergeseran yaitu dari beras diganti uang dan model jimpitan ini juga berlaku di beberapa daerah di wilayah Indonesia, contoh di wilayah perdesaan dan perkotaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

- b. Jimpitan dalam model partisipasi duka. Beberapa lembaga sosial di Indonesia berdasarkan kesepakatan anggota telah melakukan jimpitan untuk beras atau barang lain. Jimpitan ini diberlakukan ketika ada salah satu warga yang mengalami musibah, terutama salah satu anggotanya ada yang meninggal dunia, contoh jimpitan beras untuk warga yang meninggal berlaku di beberapa desa di provinsi Jawa Tengah dan DIY.
- c. Jimpitan musim panen. Dilakukan ketika masyarakat desa memasuki musim panen. Ada beberapa lembaga yang membuat tradisi agar setiap anggota menyimpan atau menyisihkan sebagian hasil panennya untuk ditabung dan diambil ketika musim paceklik. Barang hasil panen bisa dipinjam siapa saja dengan ketentuan mengikuti norma yang berlaku, contoh

jimpitan hasil nelayan di Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur Provinsi Bangka Belitung.

3. Arisan

Arisan adalah perkumpulan kredit bergilir atau asosiasi perputaran kredit dan simpanan. Menurut Abram de Swaan (1988: 33), asosiasi ini menyediakan fasilitas menabung secara pribadi dan menyediakan fasilitas kredit bagi anggota-anggotanya. Bentuk-bentuk arisan yang rata-rata berlaku di beberapa daerah di Indonesia antara lain :

a. Arisan uang

Arisan uang di Indonesia ada pada sejak jaman dulu dan kesulitan melacak kapan dimulainya, sebab banyak narasumber yang berpendapat bahwa aktivitas ini meneruskan nenek moyang dari orang tua terdahulu. Model arisan uang mulai dari tingkat RT, RW, dusun, desa, sampai ke kantor atau instansi baik pemerintah maupun swasta. Arisan yang rata-rata bersifat informal menarik uang yang sangat bervariasi dan besar kecilnya nominal tergantung dari komunitas lokal. Arisan uang di perdesaan ditilik dari aspek waktu, besarnya nominal, kepengurusan, dan keanggotaan sangat unik. Sebab, hal ini terjadi akibat dari budaya lokal setempat dan kemampuan

masyarakat lokal yang sangat bervariasi. Arisan uang yang lahir dari berbagai lembaga sosial memiliki keragaman tujuan, salah satu diantaranya adalah untuk memenuhi kebutuhan mendesak. Berikut beberapa contoh arisan uang berbasis pemenuhan kebutuhan dan partisipasi warga seperti arisan uang di Kabupaten Oki Sumatera Selatan, Pagar Alam Sumatera Selatan dan desa Sebulu Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur. Di desa ini, arisan uang digunakan untuk orang meninggal, artinya ketika ada orang meninggal dunia, maka tetangga dalam satu wilayah adat itu membayar iuran yang besarnya rupiah telah ditentukan dan uang diserahkan kepada keluarga yang sedang berduka cita untuk keperluan pemakaman dan tradisi religi.

b. Arisan barang

Arisan barang merupakan hasil kreativitas masyarakat lokal, yang dikelola masyarakat lokal. Pengelola dan pesertanya adalah orang-orang yang pernah berpengalaman menjadi pelaksana dan peserta arisan uang. Beberapa contoh model arisan barang antara lain: arisan pupuk kandang di desa Sanggup Kecamatan Kemusuk Kabupaten Boyolali,

arisan motor di kota Yogyakarta, arisan kayu di daerah Jawa Timur dan Kalimantan.

c. Arisan tenaga

Arisan tenaga adalah arisan yang pokok materinya sumberdaya manusia (SDM), jadi wujudnya bukan materi atau benda tetapi jasa. Kelahiran arisan tenaga muncul dari budaya gotong-royong yang terjadi di setiap komunitas lokal dalam berbagai lembaga sosial yang ada di perdesaan di Indonesia. Lembaga sosial sebagai penyelenggara arisan tenaga memiliki karakteristik sebagai berikut: semua jasa SDM tidak ada yang diberi upah atau honor. Mereka berhak menyumbangkan ide atau gagasan dalam rangka mempercepat pelaksanaan pekerjaan tersebut, dan memperoleh konsumsi alakadarnya. Tidak ada ketentuan waktu, jika tidak bisa hadir bisa digantikan oleh salah satu anggota keluarga yang telah dewasa. Demikian juga dengan lokasi, tidak ada kepastian, obyek pekerjaannya bervariasi dan jika perolehannya dihitung dengan angka, maka tiap anggota satu dengan yang lain perolehannya tidak sama. Beberapa contoh arisan tenaga antara lain: pertama "*nebake*" (bahasa Jawa), artinya mendatangkan bukan

menjatuhkan. Maksudnya, mendatangkan sekelompok manusia yang diharapkan dapat memberikan jasanya untuk kepentingan mengerjakan sawah/ladang atau membangun rumah. *Nebake* berlaku di desa Girisuko Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul DIY dan beberapa desa di Jawa seperti di Wonogiri. Selama proses *nebake* komunitas sebagai anggota arisan harus meninggalkan aktivitas sehari-hari sampai yang dikerjakan selesai. Kedua, arisan tenaga model tradisi kelompok *rewang* di desa Bungkus Kecamatan Parangtritis Kabupaten Bantul dan di wilayah Sumenep Madura.

4. Pengadaan fasilitas anggota
Lembaga sosial di perdesaan selain sebagai penyelenggara arisan, simpan pinjam dan jimpitan juga menyelenggarakan aktivitas yang bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan hidup anggotanya. Aktivitas ini dalam bentuk menyediakan jasa fasilitas komunitas, modal pengadaan fasilitas berasal dari iuran anggota. Fasilitas yang disediakan oleh lembaga sosial bagi pemenuhan kebutuhan anggota pada saat mempunyai hajatan dan pada saat acara masal serta kebutuhan lain. Bentuk-bentuk fasilitas yang disediakan antara lain alat-alat rumah tangga

seperti tikar, kursi, keping, perabot dapur berwujud barang pecahbelah, dinding bambu/kayu, lampu dan kabel, alat-alat pertanian sampai alat-alat untuk perawatan dan pemakaman jenazah. Contoh lembaga sosial bernama *Selasa Kliwon* di desa Caturtunggal Depok Sleman DIY telah mampu menyediakan berbagai fasilitas komunitas seperti yang disebut di atas.

5. Tabungan bersama
Lembaga sosial di perdesaan selain sebagai penyelenggara jasa fasilitas, arisan, jimpitan dan simpan pinjam juga menyelenggarakan kegiatan tabungan berupa barang yang menjadi milik bersama dan dikerjakan bersama. Tabungan bersama bukan berwujud uang, tabungan uang biasanya ada dan menjadi satu dengan kegiatan simpan pinjam uang dan arisan. Tabungan bersama berwujud barang, walaupun dalam pengadaan awal dimungkinkan anggota iuran dengan uang. Bentuk-Bentuk tabungan bersama yang dikembangkan pada lembaga sosial antara lain tabungan hewan korban bagi anggota yang muslim dan tabungan berwujud tanaman pertanian seperti menanam buah pisang atau kayu di sepanjang tepi jalan desa dan lahan-lahan kosong di kawasan perdesaan yang memungkinkan untuk dijangkau atas ijin pemuka masyarakat dan aparat desa setempat.

pelayanan sosial yang adil dan merata. Pelayanan yang adil dan merata yang dilakukan lembaga sosial di perdesaan dapat bercirikan pelayanan yang baik, bermutu, cepat dan murah. Secara tidak langsung kehadiran lembaga sosial dengan berbagai model aktivitas pelayanan mampu memotong rantai masalah dan secara implisit mempersempit kemiskinan.

Setiap lembaga sosial memiliki sumberdaya sosial dan modal sosial. Sumberdaya sosial merupakan *resources* yang terdapat dalam kehidupan bersama untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama dalam masyarakat. Akar sumberdaya sosial antara lain kejuruan, kehandalan, kesediaan bekerjasama, dan memiliki rasa kewajiban yang tinggi (*sense of duty*). Sedangkan, modal sosial merupakan kekuatan yang mampu membangun masyarakat dan *civil society* untuk meningkatkan pembangunan partisipasi. Akar dari modal sosial adalah *trust* atau kepercayaan, religi dan ideologi. Persamaan antara modal sosial dan sumberdaya sosial antara lain: a) lahir pada masyarakat sipil dan sama-sama melekat dengan lembaga sosial, b) keduanya dimungkinkan bisa hilang atau habis, c) sama-sama menjadi energi sosial. Sedangkan perbedaan keduanya terletak pada akarnya.

Berdasarkan hasil survey pada beberapa lembaga sosial diketahui bahwa rata-rata lembaga sosial memiliki strategi yang mirip dalam mempersempit kemiskinan. Strategi-

Lembaga-lembaga sosial di atas yang telah melakukan aktivitas simpan pinjam, artisan, tabungan dan pengadaan fasilitas secara tidak langsung telah melakukan penggalangan dana secara lokal. Hasil dari aktivitas tersebut mampu memenuhi kebutuhan anggota baik kebutuhan jangka panjang maupun kebutuhan jangka pendek atau kebutuhan sesaat. Aktivitas lembaga sosial di atas membuktikan bahwa setiap lembaga sosial memiliki sumberdaya sosial yang mengkrystal menjadi energi sosial. Ruh sumberdaya sosial di tingkat bawah mampu menjadi *sprit* tersendiri bagi anggota sebab *sprit* ini menjadi energi sosial yang luar biasa dalam mempersempit kemiskinan. Faktor ini mendorong kesadaran anggota merawat tradisi dalam lembaga sosial ini adalah kejuruan dan kepercayaan. Di sisi lain anggota lembaga sosial meyakini bahwa lembaga ini milik bersama maka perlu dilestarikan bersama dengan cara mematuhi norma-norma dan kesepakatan bersama.

Menurut Susetiawan (1998: 6) pelayanan yang baik adalah pelayanan yang dilakukan dengan cepat oleh petugas yang melakukan pelayanan (pengurus lembaga sosial). Kualitas pelayanan dapat menjamin kebutuhan dan memuaskan anggota yang dilayani. Hal ini sifatnya sangat tergantung kepada siapa yang melayani dan siapa yang dilayani. Kenyataannya, beberapa lembaga sosial yang hadir di tengah kehidupan masyarakat desa telah melakukan

strategi tersebut, antara lain: 1) ada sifat keterbukaan pengurus kepada anggota, sehingga lembaga sosial yang dikelola dikembangkan tidak terbatas pada sekelompok orang tertentu, 2) pembatasan dominasi pihak lain yang kurang berpihak termasuk negara, 3) pengurus berupaya menjadi media penyetaraan antara anggota yang miskin dengan yang kaya guna mengurangi ketimpangan, 4) menegakkan kekuatan (*power*) yang telah dimiliki, 5) melakukan pengembangan dengan model kolaborasi. Kolaborasi menurut Sugiyanto (2002: 88), merupakan suatu keinginan untuk bertoleransi kepada tindakan-tindakan yang cepat dan resmi dari pimpinan yang menginginkan perubahan agar tercapai kemajuan organisasi. Prinsip melakukan kolaborasi harus adil tidak boleh berat sebelah, tidak boleh saling curiga, ikhlas dan dilakukan secara terbuka (tidak laten).

Relevansi Sumberdaya Sosial dengan Pembangunan

Lahirnya lembaga sosial di tengah kehidupan masyarakat membuktikan bahwa masyarakat memiliki kreativitas yang tinggi. Hal ini dapat dibuktikan dengan bervariasinya masing-masing lembaga sosial dalam mengembangkan gagasan para anggota. Hasil karya kreativitas pengurus lembaga sosial ternyata sinergi dengan mayoritas program pembangunan yang dilakukan oleh negara. Data menunjukkan keterkait-

an sumberdaya sosial pada lembaga sosial antara lain: 1) sumber daya sosial merupakan aset penting bagi masyarakat, sebab dalam masyarakat ada aset-aset lain yang saling terkait, 2) sumber daya sosial dalam bentuk norma-norma kelembagaan membantu masyarakat di dalam mengelola risiko atau beban hidup, sebab setiap individu sebagai anggota dalam lembaga sosial memiliki kerentanan terhadap risiko, 3) individu sebagai elemen masyarakat selalu membantu masyarakat lain yang dilandasi oleh hubungan sosial informal dan tenggang rasa yang kuat, 4) sumberdaya sosial sebagai salah satu kunci yang mengkondisikan masyarakat menjadi ulet dan menjadi pondasi dalam berpartisipasi. Dengan demikian maka lembaga sosial yang cenderung bersifat non formal mampu menjadi jaring sosial dan media belajar bagi anggota untuk membangun *mutual trust* yang bertanggungjawab dapat dimaksimalkan fungsinya dan harus dilestarikan untuk generasi berikutnya. Sumberdaya sosial yang dikembangkan secara maksimal dan berkelanjutan akan selalu menghasilkan nilai-nilai atau norma-norma kehidupan kolektif dalam masyarakat termasuk didalamnya lembaga sosial.

Norma-norma yang dibangun dalam lembaga sosial ternyata mampu merespon berbagai gonjangan masyarakat terutama gonjangan yang bersifat eksternal. Sumberdaya yang melawan respon dimaknai sebagai energi sosial. Dalam kehidupan sehari-hari, energi sosial akan tampak

dan terakumulasi menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa, sebab jika energi sosial ini dinominalkan maka akan memiliki nilai yang sangat tinggi. Kemunculan energi sosial dalam ikatan lembaga sosial di kehidupan masyarakat pun amat sulit untuk diperhitungkan dengan berbagai indikator, sehingga kadang terjadi atau muncul di luar perencanaan. Berdasarkan pengalaman, maka motivasi publik masuk menjadi anggota di dalam lembaga sosial antara lain mencari tambahan energi, mencari pengalaman, mencari status sosial, kesediaan dan kerelaan belajar dari orang lain, serta upaya untuk melestarikan norma-norma lokal. Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa lembaga sosial mampu menjadi media belajar (*social learning*) bagi anggotanya.

Berkait dengan pelaksanaan pembangunan yang digarap oleh negara, maka lembaga sosial memiliki beberapa produk keunggulan kebijakan dibanding dengan kebijakan-kebijakan produk pemerintah. Keunggulan tersebut, antara lain proses merumuskan kebijakan lebih tepat dan cepat, lebih sejalan dengan kehendak masyarakat, sehingga implementasinya lebih mudah, dan kebijakannya bersifat elastis menyentuh hal-hal yang kecil. Untuk mengharmonisasikan dan melestarikan sumberdaya sosial di perdesaan dalam proses pembangunan perlu menebarkan peta sebagai tantangan agar dipahami secara internal bagi anggota dan pengurus, secara

eksternal bagi pihak luar termasuk negara. Tantangan yang dominan bersifat eksternal seperti urbanisasi, dominasi negara, globalisasi, dan campur tangan organisasi non pemerintah (LSM, yayasan, donor). Tantangan bersifat internal adalah pentingnya sosialisasi dan regenerasi sebagai upaya melestarikan lembaga sosial bagi pendatang baru agar mereka mampu melakukan adaptasi untuk memperkuat kesinambungan dan kelestarian.

Gagasan yang perlu dibangun untuk memperkuat posisi lembaga sosial di level bawah adalah bagaimana upaya-upaya memberikan *power* dan kesempatan kepada lembaga-lembaga sosial tersebut, agar lembaga sosial mampu berkiprah lebih luas, bermakna dan bermanfaat bagi seluruh anggotanya. Jika gagasan ini berhasil, maka setidaknya lembaga sosial mampu menjadi mitra atau pasangan pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. Bentuk *power* yang dimungkinkan dikembangkan pada tataran lembaga sosial seperti tindakan dan kewenangan, advokasi, dan hukum.

Sedang aktivitas konkrit yang dapat dilakukan oleh lembaga sosial, antara lain: penyelenggara pelatihan ketrampilan kesempatan kerja, usaha peningkatan pendapatan keluarga, fasilitasi MCK umum, pendampingan pengelolaan ekonomi rumah tangga khususnya bagi keluarga-keluarga yang rentan ekonomi dan rehabilitasi daerah layak huni. Contohnya: PKK Kota Yogyakarta memperoleh

kesempatan dari pemerintah untuk mengembangkan pelayanan publik dalam bentuk mitra keluarga dan *Kost Crisis Center* (KCC). Dua lembaga ini membuka layanan kepada publik khususnya keluarga yang memiliki masalah atau keluarga rentan, demikian pula KCC sebagai pusat layanan anak kost dengan berbagai problemnya.

Sedangkan, jika kita tengok lembaga sosial di perdesaan perlu dibangun dan diberi kesempatan. Khususnya lembaga sosial yang berkiprah menggarap para petani. Problem berat petani di Indonesia, petani bagaikan pemilik perusahaan tetapi petani belum pernah memperoleh haknya untuk menentukan harga jual produksinya. Maka penting bagi kita untuk memberi dorongan kepada para petani, untuk membangun lembaga sosial yang mengarah pada penguatan dalam menentukan harga jual produknya.

PENUTUP

Lembaga sosial tumbuh berdasarkan relasi sosial atau ikatan primordial bersifat legal informal. Lembaga ini memiliki fungsi signifikan dan strategis dalam menjawab dan menyelesaikan persoalan yang dihadapi termasuk kemiskinan bagi anggotanya. Lembaga sosial menjadi jembatan berbagai kepentingan misalnya, pada persoalan kongkrit berbasis pada kebutuhan seperti masalah sosial, ekonomi, dan politik. Namun, lembaga sosial juga memiliki peluang dikooptasi negara atau pihak

luar. Sedangkan dari faktor internal, mereka mengkhawatirkan hilangnya lembaga sosial karena keterlambatan regenerasi dalam melestarikan pada pendatang baru terutama jika lembaga tersebut sudah tidak mampu memberi rasa nyaman dan keselarasan pada anggota serta memberikan ancaman masa depan.

Pelajaran berharga tentang studi lembaga sosial di perdesaan, bahwa masyarakat desa memiliki sumberdaya sosial dan sumberdaya ini tidak signifikan terhadap pola pemilik tanah dan kekayaan lain. Masyarakat desa lebih memiliki ketaatan ketaqwaan, kesetiaan terhadap hasil musyawarah. Walaupun masyarakat desa miskin ekonomi, tetapi ada kecenderungan kaya hati, kaya iman, dan kaya moral. Sebab anggota pada lembaga sosial di perdesaan cenderung bangkit atas kesadaran moral ini dapat dibuktikan dengan sikap rela berkorban untuk menyediakan sarana dan tenaga demi kepentingan bersama.

Bila lembaga sosial di desa memiliki kekuatan dan berfungsi secara optimal, maka lembaga sosial mampu menjadi benteng *poor criminality*, yakni fenomena terjadinya kejahatan yang muncul karena motif ekonomi atau harta benda, seperti: perampokan, pembunuhan, dan pencurian. Banyak terjadinya kejahatan dilatarbelakangi faktor dendam, himpitan ekonomi, motif politik dan kemiskinan struktural. Menurut Menteri Sosial RI Bactiar Chamsyah (Kedaulatan Rakyat, 2008), dari kemiskinan orang jadi

bodoh dan terbelakang. Untuk mengatasi kemiskinan pemerintah tidak bisa sendiri perlu pihak lain termasuk peran lembaga-lembaga sosial, strategi menyelesaikan bersatu dan berfikir jernih.

Pemerintah telah memberikan aksi layanan publik untuk mengentaskan kemiskinan seperti yang dijelaskan pada bagian pendahuluan di atas, tetapi kenyataannya penduduk miskin di Indonesia semakin hari semakin bertambah, mengapa hal ini terjadi? Jawaban atas pertanyaan tersebut ada 2 (dua), yaitu: 1) bahwa program yang dilakukan belum berbasis kepada keadilan, artinya program-program tersebut cenderung bersifat *top down* (kehendak pemerintah) bukan kehendak masyarakat miskin, sehingga kesadaran yang dilakukan oleh penduduk miskin belum optimal, 2) ada kemungkinan bahwa semua regulasi program pengentasan kemiskinan di atas dihapuskan atau ditiadakan. Pemerintah didesak untuk memberikan kebijakan baru bahwa semua penduduk yang berusia sekolah dari TK sampai SMA/SMK gratis, anggaran pendidikan ditanggung oleh pemerintah. Demikian pula penduduk yang berusia nol tahun sampai 15 tahun apabila menderita sakit apapun (berat dan ringan) bebas biaya kesehatan di rumah sakit pemerintah dan Puskesmas. Anggaran untuk kesehatan dan pendidikan tersebut ditanggung pemerintah yang bersumber dari berbagai program bantuan yang telah dilaksanakan dan

anggaran rutin pendidikan dan kesehatan. Jika wacana ini dapat dilakukan berarti pemerintah telah melakukan amanat pembukaan UUD 1945 khususnya alenia empat. Sebab beban hidup yang paling berat ditanggung oleh penduduk miskin adalah pendidikan dan kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Diamond, Larry. 1999. *Developing Democracy. Toward Consolidation*. Baltimore: The John Hopkins University Press.
- Dillon, H.S dan Hermanto. 1993. *Kemiskinan di Negara Berkembang. Masalah Konseptual dan Global*. Jakarta: Prisma. No.3. Tahun ke XII. LP3ES.
- Hartono. 2004. *Program Penanggulangan Kemiskinan di perkotaan (P2KP) Sebagai Alternatif Mengatasi Kemiskinan dan pemberdayaan Masyarakat*. Jurnal Ilmu Sosial Alternatif STPMD "APMD" Yogyakarta: Volume V, No.10.
- Irham. 2008. "Kemiskinan Struktural". *Kedaulatan Rakyat*. Yogyakarta: Edisi 21 Mei. hal 1.
- Nugroho, Heru. 2001. *Negara, Pasar dan Keadilan sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hyden, Goran. 1998. *Building Civil Society at the Turn of the Millennium, dalam John Burbidge (ed.). Beyond Price and*

- Merchant. New York: PACT publication.
- Parrillo, Vincent. 1987. *Contemporary Social Problems*. New York: John Wiley and Sons.
- Rahmad. 2007. *Mujizat Sedekah*. Yogyakarta: Pustaka Mawar.
- Sugiyanto. 2007. *Strategi Menuhkan Organisasi Sosial di Perdesaan*. Jurnal Ilmu Sosial Alternatif STPMD "APMD" Yogyakarta: Volume VIII, No.1.
- Sugiyanto, 2002. *Lembaga Sosial*, Yogyakarta: Global Pustaka Utama.
- Suharko. 2005. *Masyarakat Sipil, Modal Sosial dan Pemerintahan yang Demokratis*. Jurnal Ilmu Sosial Politik. Yogyakarta: Volume 8 No 3. Universitas Gajah Mada.
- Suharto. Edi. 2008. *Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Supardal. 2007. *Desa dan Jaringan Kemiskinan*. Jurnal Ilmu Sosial Alternatif STPMD "APMD", Yogyakarta: Volume VIII, No.1.
- Soekamto, Suryono. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Susetiawan. 1998. *Orientasi Pembangunan Masyarakat Desa Menyongsong Abad 21*. Jurusan Ilmu Sosiatri UGM. Yogyakarta: Aditya Media.
- Teguh S, Ambar. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gaya Media.
- Utaryo, Ciptaningsih. 2005. *Kembang Setaman*. Yogyakarta: Yayasan Sayap Ibu.

Sumber Lain:

- Chamsyah, Bachtar. 21 Mei 2008. Kemiskinan Struktural. *Kedaulatan Rakyat*. Yogyakarta. him 3.
- Irham. 21 Mei 2008. Kemiskinan Struktural. *Kedaulatan Rakyat*. Yogyakarta: hlm. 3.